

RENCANA STRATEGIS

2024-2026



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pasuruan**



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Renstra DP3AP2KB adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Renja DP3AP2KB adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA
DP3AP2KB

Pasal 2

- (1) Renstra DP3AP2KB Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra DP3AP2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi DP3AP2KB dalam menyusun Renja DP3AP2KB.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra DP3AP2KB disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra DP3AP2KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala DP3AP2KB wajib melaksanakan Renstra DP3AP2KB dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala DP3AP2KB wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra DP3AP2KB.
- (2) Kepala DP3AP2KB menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

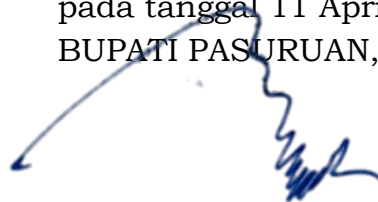
Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra DP3AP2KB Tahun 2027, Renstra DP3AP2KB Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja DP3AP2KB Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 29

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra DP3AP2KB, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra DP3AP2KB harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra DP3AP2KB dan Renja DP3AP2KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan Renstra DP3AP2KB tahun 2024-2026 dilakukan dua minggu setelah penetapan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra DP3AP2KB meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum DP3AP2KB /lintas Renstra DP3AP2KB, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra DP3AP2KB memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra DP3AP2KB Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja DP3AP2KB dan Perubahan Renja dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu tindakan awal yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya (sumber daya modal dan sumber daya manusia) mencapai strategi yang ditetapkan. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa setiap Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Renstra.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2024-2026 Kabupaten Pasuruan. Dikarenakan pada tahun 2024 terdapat kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan maka melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2022 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru. Proses penyusunan Renstra ini diawali dengan mengkaji strategis untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kabupaten Pasuruan. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal (program Bupati, kondisi objek urusan PD, dan lainnya) dan lingkungan internal (kondisi internal PD yang meliputi SDM, peralatan, kebijakan, dan lainnya). Kajian tersebut dilengkapi dengan hasil evaluasi Renstra PD periode sebelumnya.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Tahun 2024 - 2026 menggambarkan tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Komponen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Pasuruan dan pelaksanaan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan pelaksanaan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dituangkan dalam dokumen induk perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

Sebagai dokumen induk, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat Dinas dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis yang ada dibawahnya. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Dinas P3AP2KB memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional tahun 2005 – 2025
6. Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
13. Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Banguna Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2022 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
24. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasuruan;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 179 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Gerakan Keluarga Bersih Bersama Sadar Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 - 2026 :

1. Maksud :

- a. Menjamin konsistensi pencapaian program prioritas sesuai dengan kebutuhan
- b. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan secara kronologis dan berkelanjutan
- c. Memberi gambaran tentang kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun anggaran 2024 – 2026
- d. Sebagai acuan pedoman kerja terutama bagi segenap pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan adalah agar :

- a. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan RPD Kabupaten Pasuruan menjadi jelas dan tidak bias
- b. Keterkaitan antar komponen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi jelas dan tidak biasa.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.4. Konsumen pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 3.2. Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2. Cascading kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 179 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang penyelenggaraannya dituangkan sesuai tugas, fungsi dan struktur organisasi.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati di bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

Dari masing-masing bagian mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:
 - 1) penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - 2) pelaksanaan dan pengelolaan administrasi dinas yang meliputi administrasi perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
 - 3) pengelolaan administrasi perlengkapan, barang milik daerah dan/atau barang milik negara;
 - 4) pengelolaan urusan rumah tangga kedinasan;
 - 5) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan ;
 - 6) koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan/ Kementerian terkait ;
 - 7) koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
 - 8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi tata kelola organisasi; dan
 - 9) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasi, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 2) Pembagian Tugas sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan;
 - 3) Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di

Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 4) Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Kualitas Keluarga, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data dan Informasi Gender dan Anak serta terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya di bidang perlindungan khusus anak;
- 5) Penyiapan Forum Koordinasi, Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Kualitas Keluarga, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data dan Informasi Gender dan Anak, serta terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya di bidang perlindungan khusus anak;
- 6) Penyiapan perumusan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Kualitas Keluarga, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data dan Informasi Gender dan Anak, serta Pemenuhan Hak Anak di Hak Anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya di bidang perlindungan khusus anak;
- 7) Penyiapan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga, Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Sistem Data dan Informasi dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak dan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia

usaha di bidang Perlindungan Anak anak;

- 8) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lintas Sektor;
- 9) pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 10) penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja dan anggaran Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- 2) perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pembinaan di bidang Pengendalian penduduk Penyuluhan dan Penggerakan;
- 4) pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- 5) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lintas Sektor;
- 6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan;
- 7) penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan; dan
- 8) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

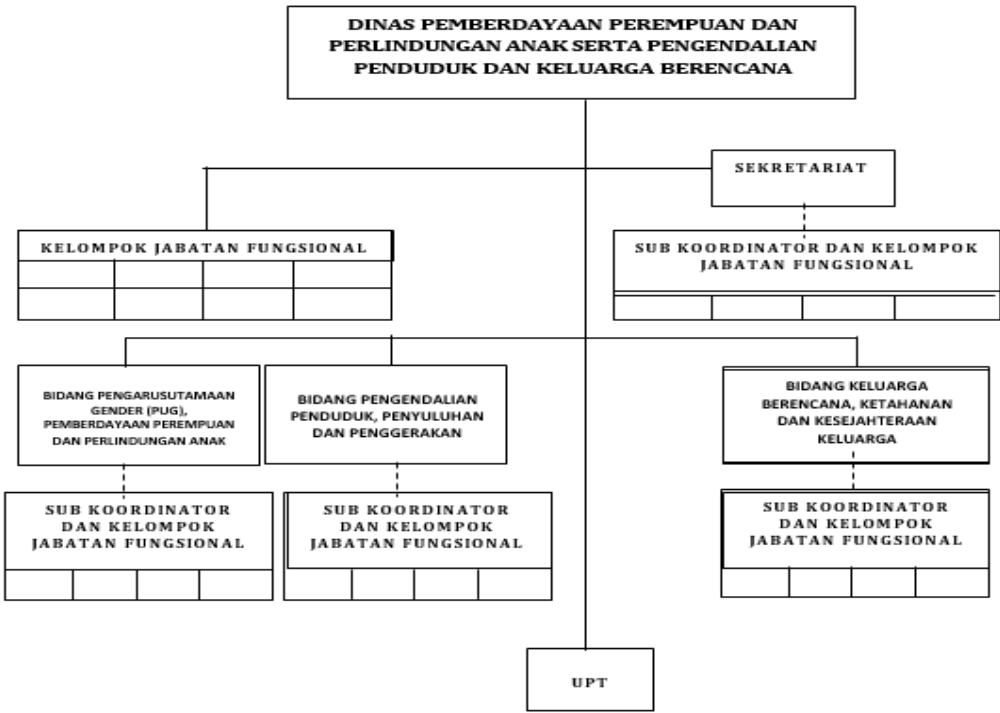
- 1) penyusunan Program Kerja dan Anggaran Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 2) perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 3) pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- 4) pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 5) pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 6) penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 7) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lintas Sektor;
- 8) penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 9) pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
dan
- 10) Melaksanakan fungsi-fungsi-lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. Setiap kelompok dipimpin subkoordinator pelaksana fungsi

pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- d. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- e. Subkoordinator ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- f. Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.



Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai karyawan dan sumber daya sebagai berikut :

1. Jumlah PNS dan PTT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :
a. Jumlah PNS = 22 orang (terdiri dari 10 laki – laki & 12 Perempuan)
b. Jumlah PTT (Peg. Tidak Tetap) = 2 orang (terdiri dari 1 Laki – laki dan 1 Perempuan)
2. Rekapitulasi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut jenjang Eselon :

Tabel 2.2 :
Distribusi Eselon berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon II.b	-	1	1
2.	Eselon III.a	1	-	1
3.	Eselon III.b	2	1	3
Total		3	2	5

3. Rekapitulasi PNS Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menurut Golongan dan Ruang sebagai berikut :

Tabel 2.3 :
Distribusi Golongan dan Ruang berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan (IV/c)	-	1	1
2.	Golongan (IV/b)	-	-	-
3.	Golongan (IV/a)	3	2	5
4.	Golongan (III/d)	2	4	6
5.	Golongan (III/c)	1	1	2
6.	Golongan (III/b)	2	2	4
7.	Golongan (III/a)	2	1	3
8.	Golongan (II/d)	-	1	1
9.	Golongan (II/c)	-	-	-
Total		10	12	22

4. Rekapitulasi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut jenjang pendidikan formal .

Tabel 2.4 :
Distribusi Eselon berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	S-2	5	6	11
2.	S-1	3	5	8
3.	D-III / D-I	-	-	-
4.	SMA	2	1	3
T o t a l		10	12	22

5. Perlengkapan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menempati Gedung Pemda Kabupaten Pasuruan terbagi 5 Ruangan Kerja, 2 Ruang Pertemuan, 1 Ruang Gudang Alat Kontrasepsi dan menggunakan fasilitas:

- a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 11 Unit terdiri 5 kendaraan operasional dan 2 unit Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB (lengkap dengan peralatan Elektronik dan KIE), Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB (lengkap dengan Peralatan Medis/Kedokteran), Mobil Angkutan Peserta KB, Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN), Mobil Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Mobil Box)
- b. Kendaraan Roda 2 (dua) untuk petugas lapangan setiap PLKB/PKB membawa 1 Motor sebanyak 130 unit dan 2 unit kendaraan Sepeda Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN)
- c. Alat pendukung Dinas Fasilitas sarana menunjang kegiatan yaitu peralatan/administrasi perдинasian dan didukung peratan Informasi Teknologi (IT) :
 - 1. Personal Computer/PC : 16 unit
 - 2. Laptop/ Notebook : 13 unit
 - 3. LCD/ Proyektor : 3 unit
 - 4. Printer dan Scanner : 20 unit
 - 5. Internet : 1 Paket
 - 6. Untuk Balai KB Kecamatan 48 PC dan Printer 48 buah.

Berdasarkan data tersebut masih ada beberapa tambahan Sumber Daya lainnya yang memang dibutuhkan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran indikator kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan pada 2019 - 2022 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesertaan ber-Keluarga Berencana

Indikator keluarga berencana diukur dari Tingkat kesertaan ber Keluarga Berencana yang diformulasikan dalam tingkat Prevalensi (proporsi jumlah Pasangan Usia Subur terhadap tingkat pemakaian kontrasepsi atau Peserta KB aktif dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Diagram 2.1 : Trend target dan Pencapaian Indikator Presentase Sasaran PUS yang menjadi Peserta KB Aktif

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan selama 3 tahun terakhir terdapat peningkatan dan sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif menunjukkan nilai diatas target yang telah ditentukan. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan capaian presentase cakupan PUS yang menjadi peserta KB Aktif . hal ini dikarenakan pada awal tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang dimana seluruh mobilitas masyarakat di batasi serta turunnya pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan banyak masyarakat terkena imbas seperti kehilangan pekerjaan. Namun Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki solusi untuk membebaskan biaya pelayanan KB melalui Surat Edaran Nomor 900/992/424.080/2020 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Peserta Ber KB Selama Masa Tanggap Darurat COVID-19 di Kabupaten Pasuruan, agar masyarakat yang ingin ber-KB namun terkendala biaya, bisa melakukan KB secara gratis di faskes-faskes pelayanan KB.

2. **Meningkatnya Ketahanan Keluarga yang Sejahtera**

Indikator keluarga sejahtera diukur dari Tahapan Keluarga Sejahtera Prosentase penurunan Tahapan Keluarga (Pra-Sejahtera dan KS-I) merupakan upaya monitor peningkatan kesejahteraan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

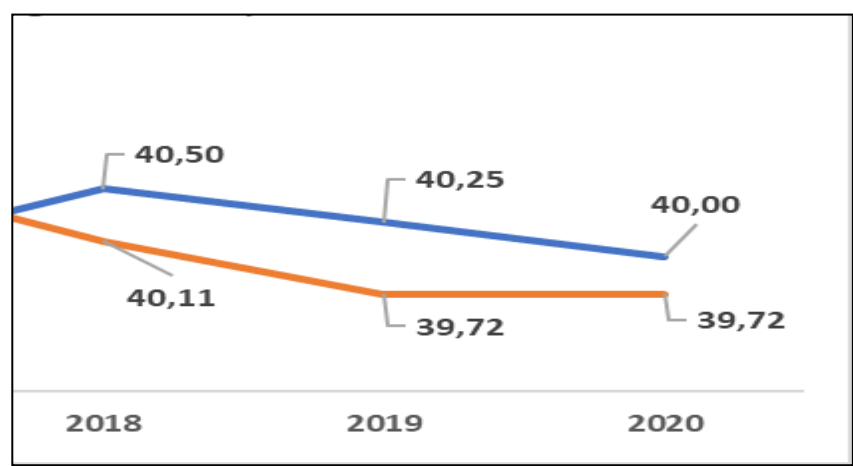


Diagram 2.2 : Trend target dan Pencapaian tahapan keluarga Pra-S dan KS-I

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan selama 3 tahun terakhir terdapat tren penurunan prosentase tahapan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1, walaupun masih menunjukkan nilai diatas target yang telah ditentukan.

Namun pada tahun 2021, indikator prosentase tahapan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 diganti menjadi Indeks Pembangunan Keluarga (IPK/IBangga). Hal ini dikarenakan penyesuaian indikator dari BKKBN. IPK terdiri dari 3 komponen yakni Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan. Hasil capaian IPK Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 adalah sebesar 55,20. Capaian tersebut termasuk dalam kategori IPK yang cukup baik (berkembang) karena nilai tersebut diantara 40-70.

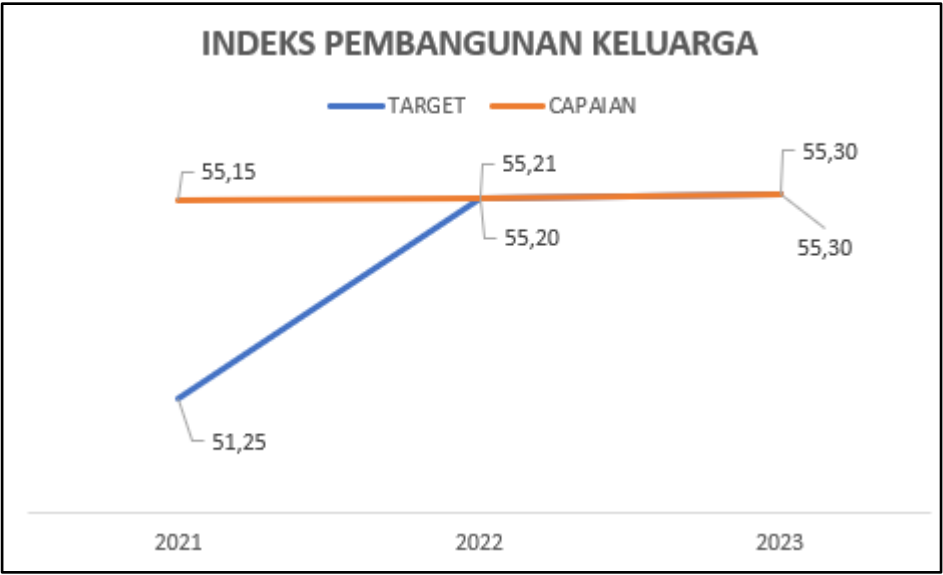


Diagram 2.3 : Trend target dan Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Keluarga 2021-2023

3. **Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Sasaran yang akan dicapai pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a. Persentase penanganan kekerasan perempuan dan anak
Pada tahun 2019 dan 2020 ada perubahan formulasi perhitungan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, bukan lagi membandingkan dengan jumlah KK rumah namun jumlah perempuan dan anak di Kabupaten Pasuruan. Berikut ini tren grafik Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak

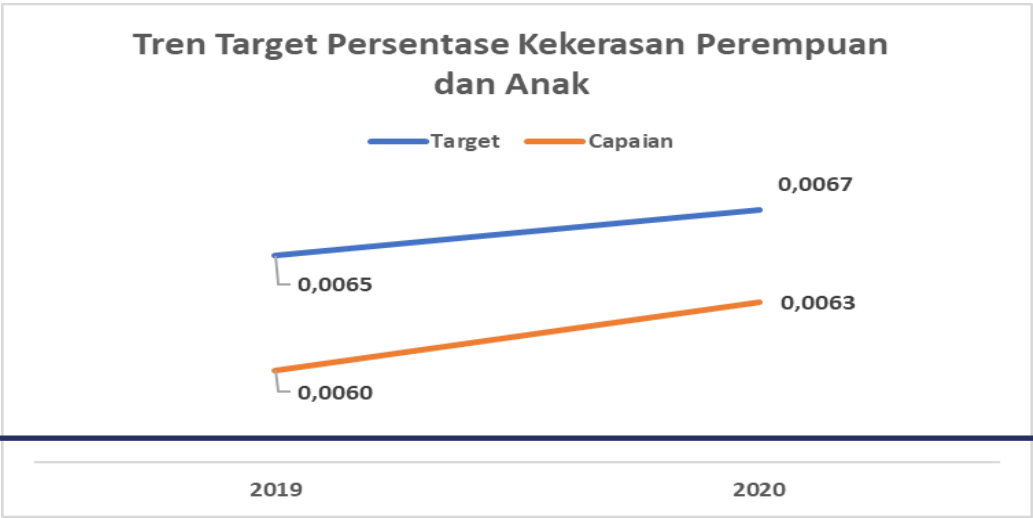


Diagram 2.4 : Trend target dan Pencapaian Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak

Namun di tahun 2021 hingga 2023 terdapat perubahan indikator yakni Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak. Hal ini dikarenakan kita bisa melihat sejauh mana kasus yang sudah dilaporkan dan sudah tertangani. Capaian persentase penanganan kekerasan perempuan dan anak tahun 2022 adalah sebesar 87,76% dengan jumlah penanganan kekerasan perempuan dan anak 43 kasus dan jumlah laporan kekerasan perempuan dan anak 49



Diagram 2.4 : Trend Target dan Capaian Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak

b. Persentase Anggaran yang Responsif Gender

Pada tahun 2019 indikator ini ditambahkan untuk mendukung program Bupati dalam pelaksanaan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) wajib berdasarkan pada prinsip anggaran berbasis kinerja yakni Ekonomis, Efisien dan Efektif serta menambahkan prinsip *Equity*. Di dalam dokumen PPRG tersebut terdiri dari *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). Anggaran responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Diharapkan tiap OPD di

Kabupaten Pasuruan memiliki Anggaran yang Responsif Gender. Berikut ini tren target dan capaian persentase anggaran yang responsif gender

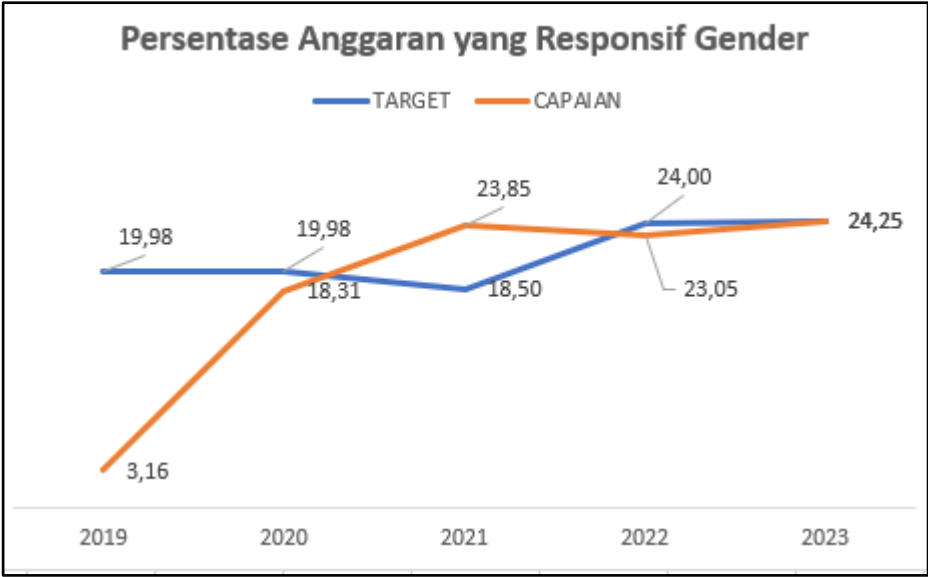


Diagram 2.5 : Trend Target dan Pencapaian Persentase Anggaran yang Responsif Gender

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target (SPM, IKK dan Indikator Lainnya)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah																
	Indikator Tujuan PD:																
	Indeks Pembangunan Gender		90,76	90,91	91,07	91,22	91,38	90,68	90,48	91,22	90,44	91,38	99,91	99,53	100,16	99,69	100
	Indikator Sasaran PD:																
	Persentase Anggaran yang Responsif Gender		19,98	19,98	18,50	18,60	18,70	3,16	18,31	18,60	23,05	23,05	15,816	91,64	100,54	102	100
	Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak		0,007	0,0060	-	-	-	0,0067	0,0063	-	-	-	103,08	105,00	-	-	-
	Persentase penanganan kekerasan perempuan dan Anak		-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
	Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif		73,00	75,20	75,00	75,20	75,40	75,14	74,91	75,20	73,42	75,40	102,93	99,61	100,27	98	100
	Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS I		40,25	40,00	-	-	-	39,72	39,72	-	-	-	98,683	99,30	-	-	-

	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)		-	-	51,25	55,20	55,30	-	-	55,15	55,20	55,30	-	-	107,71	100	100
	Persentase Kampung KB mandiri		-	-	-	15,38	17,90	-	-	-	15,35	17,90	-	-	-	100	100
	Nilai SAKIP OPD		-	80,80	80,90	81,00	83,50	-	80,79	80,90	82,08	83,50	-	99,99	100,12	101,33	100
2	Indikator SPM																
	Diisi Indikator.....																
3	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)																
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD		19,98	19,98	18,50	18,60	18,70	3,16	18,31	18,60	23,05		15,82	91,64	100,54	102	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten							0,006	0,008	0,013	100						
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)							0,003	0,006	0,004	9,76						
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
	TFR (Angka Kelahiran Total)							1,84	1,95	2,04	2,04						

	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		73,00	75,20	75,00	75,20	75,40	75,14	74,91	75,20	73,24						
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)							11,16	10,58	11,71	11,16						

Periode Pelaksanaan: 2018-2023

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran Perubahan RPMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

No	Sasaran	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										Unit Penanggung jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)														
1	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan perkantoran	100%	100%		100%		100%						100%		100%								100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!									
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon / internet	12 Bln	24 Bln		12 Bln	85.098.400	24 Bln	85.098.400					12 Bln	89.383.396	24 Bln	83.588.659							100	105,04	100	98,259									
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola aset, pelaku pengadaan barang / jasa	12 Bln	24 Bln		12 Bln	90.000.000	24 Bln	90.000.000					12 Bln	90.770.000	24 Bln	85.140.000							100	100,856	100	94,6									
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	12 bln	24 bln		12 bln	35.000.000	24 bln	35.000.000					12 bln	34.562.200	24 bln	29.780.000							100	98,7414	100	85,0857									
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang cetakan dan Penggandaan	12 bln	24 bln		12 bln	24.500.000	24 bln	24.500.000					12 bln	24.256.000	24 bln	35.454.500							100	99,008	100	144,712									
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bln	24 bln		12 bln	22.500.000	24 bln	22.500.000					12 bln	159.917.500	24 bln	9.760.000							100	71,0744	100	43,3778									
		Penyediaan Makanan	Jumlah pembelian	12 bln	24 bln		12 bln	71.500.000	24 bln	71.500.000					12 bln	84.9	24 bln	39.9							100	118,8	100	55,8									

[illegible]

		Penilaian Angka Kredit	Jumlah kegiatan Penilaian Angka Kredit	3 k e g	3 k e g	3 k e g	12.80 0.000								3 k e g								10 0	0								
		PROGRA M PENINGK ATAN PENGEM BANGAN SISTEM PELAPOR AN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGA N	Meningkatny a Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 % 0 0	1 % 0 0	1 % 0 0									1 % 0 0								10 0	#D IV/ 0!								
		Bimbinga n Tehnis PKLB/PK B tentang R/R	Jumlah kegiatan Bimtek PLKB/PKB tentang R/R	1 k e g	1 k e g	1 k e g	17.00 0.000								1 k e g	16.7 20.0 00							10 0	98, 35 29 4								
		Pelatihan pencatata n Pelaporan Pelayanan Kontrasep si	Jumlah kegiatan Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi	1 k e g	1 k e g	1 k e g	17.76 8.520								1 k e g	67.1 01.3 00							10 0	37 7,6 41 5								
		Desiminas i Pencatata n dan Pelaporan	Jumlah kegiatan Desiminasi Pencatatan dan Pelaporan		1 k e g	1 k e g	64.80 0.000								1 k e g	45.3 42.0 00							10 0	69, 97 22 2								
		Forum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Forum Perangkat Daerah	1 k e g	1 k e g	1 k e g	26.00 0.000								1 k e g	23.7 31.5 00							10 0	91, 27 5								
2	Meni ngka tnya Kese rtaan ber- KB	PROGRA M KELUARG A BERENCA NA	Prosentase Akseptor KB Baru	1 % 0 0	0 0										9 % 0								#D IV / 0 !	#D IV/ 0!								
		Pelayanan KIE	Jumlah kegiatan pelayanan KIE	2 k e g	1 k e g	1 k e g	50.00 0.000								1 k e g	47.3 93.2 00							10 0	94, 78 64								
		Tentara Manungga l KB dan Kesehatan	Jumlah kegiatan Gelar TMKK	2 k e g	1 k e g	1 k e g	40.00 0.000								1 k e g	34.7 36.4 00							10 0	86, 84 1								
		Peningkat an Pelayanan KB Momentu m	Jumlah kegiatan Pelayanan KB Momentum	3 k e g	2 k e g	2 k e g	226.3 65.83 0								2 k e g	216. 181. 100							10 0	95, 50 07 7								
		Sosialisasi Kontrasep si KB Rasional	Jumlah kegiatan Sosialisasi Kontrasepsi KB Rasional	1 k e g	1 k e g	1 k e g	15.49 9.800								1 k e g	11.8 04.7 00							10 0	76, 16 03 4								
		Operasion al Penyuluh an Kependud ukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Biaya Operasional Penyluhan KKB	1 bl 2 n	1 b 2 l n	1 b 2 l n	6.741 .525. 000								1 b 2 l n	4.52 8.09 8.61 1							10 0	67, 16 72 7								

		Temu Kader IMP / PPKBD	Jumlah kegiatan Temu Kader	1 k e g	1 k e g	1 k e g	102.890.250								1 k e g	29.571.000							100	28,74033								
		Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD	Jumlah kegiatan Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD	12 e g	12 e g	12 e g	817.890.500								12 e g	18.800.000							100	2,298596								
		Medis Teknis KKBPK	Jumlah kegiatan Medis Teknis KKBPK	-	4 k e g	4 k e g	20.000.000								4 k e g	7.000.000							100	35								
		Pembinaan Kelompok KB Pria	Jumlah kegiatan Pembinaan Kelompok KB Pria	-	4 k e g	4 k e g	10.000.000								4 k e g	102.606.400							100	1026,064								
		Fasilitasi dan Pembinaan Kampung KB	Jumlah kegiatan Pembinaan Kampung KB	-	1 k e g	1 k e g	50.000.000								1 k e g	814.608.800							100	1629,218								
		PROGRAM PELAYANAN KONTRAS EPSI	Prosentase Pelayanan Kontrasepsi	100 %	00										6 %								#DIV/0!	#DIV/0!								
		Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi	1 k e g	1 k e g	1 k e g	58.500.000								1 k e g	28.846.000							100	49,3094								
		Pengayoman Kontrasepsi (Komplikasi, Kegagalan dan Pastmir)	Jumlah Akseptor yang terayomi Kegagalan dan Komplikasi	20 or g	60 or g	60 or g	8.550.000								30 or g	1.615.162							50	18,89078								
		PROGRAM RANCANGAN INDUK PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase Meningkatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100 %	00																		#DIV/0!	#DIV/0!								
		Sosialisasi Dimensi Kependudukan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Dimensi Kependudukan	1 k e g	1 k e g	1 k e g	24.231.000								1 k e g	31.828.500							100	131,3545								
		Pembinaan Koalisi Kependudukan	Jumlah kegiatan Pembinaan Koalisi Kependudukan	1 k e g	1 k e g	1 k e g	40.000.000								1 k e g	34.015.000							100	85,0375								
		PROGRAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN KB	Meningkatnya dukungan Sarpras Pelayanan KB	100 %																			#DIV/0!	#DIV/0!								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									12	Dokumen	1.240.650.000	12	Dokumen	1.504.800.000	12	Dokumen	1.655.280.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---------	---------------	----	---------	---------------	----	---------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Pengadaa n Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan								2 unit	6.109. 000	2 unit	24.99 7.250	2 unit	27.496 .975					-										0, 00						
		Pengadaa n Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan								0 unit		0 unit	-	1 unit	200.00 0.000															#D IV /0 !						
		Kegiatan Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah								1 0 % 0	113.94 6.528	1 0 % 0	177.4 32.20 0	1 0 % 0	195.17 5.420															0, 00						
		Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								3 6 Lapo ran	88.972 .978	3 6 Lapo ran	99.98 2.200	3 6 Lapo ran	109.98 0.420						61.6 49.8 35									69 ,2 9						
		Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								1 2 Lapo ran	24.973 .550	1 2 Lapo ran	77.45 0.000	1 2 Lapo ran	85.195 .000						72.4 30.0 00									29 0, 03						
		Kegiatan Pemelihara aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah dalam Kondisi Baik								1 4 unit	224.81 5.295	1 4 unit	111.5 34.36 9	1 4 unit	115.18 7.896						179. 885. 060									80 ,0 1						
		Penyediaa n Jasa Pemelihara aan, Biaya Pemelihara aan dan Pajak Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								1 1 unit	119.98 8.190	1 1 unit	74.99 9.100	1 1 unit	74.999 .100						148. 555. 612									12 3, 81						
		Pemeliha an/Reha bilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang								1 unit	14.966 .125	1 unit	16.49 7.669	1 unit	18.147 .436						10.1 09.0 00									67 ,5 5						

[illegible]

[illegible]

		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak dengan kebutuhan khusus yang ditangani																																#D IV /0 !
		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus							50	Layanan	224.636.000	60	Dokumen	159.851.540	70	Dokumen	175.836.694																	0,00
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota							50	Orang	214.636.000	60	orang	148.851.640	70	orang	163.736.804			66.606.000														31,03
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota							50	Layanan	10.000.000	60	Layanan	10.999.900	70	layanan	12.099.890																	0,00
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen pelaksana Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota																																#D IV /0 !

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																													#DIV/0!						
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																													#DIV/0!						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																													#DIV/0!						
3	Meningkatkan keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas melalui kesertaan ber-KB	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah Kampung KB yang Mandiri																													#DIV/0!						
		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan	Jumlah Kader IMP Kecamatan yang mengikuti Pemaduan								2753 kader	5.000.000	2753 kader	5.500.000	2753 kader	6.050.000																0,00						

[illegible]

		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga								0 laporan															#DIV/0!						
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Meningkatkan Jumlah Peserta KB Baru																							#DIV/0!						
		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB								12 dokumen	1.551.730.450	12 dokumen	1.563.730.340	12 dokumen	2.351.759.984										0,00						
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan budaya lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal								2 dokumen	9.999.200	3 dokumen	21.999.900	10 dokumen	51.500.000	-									0,00						
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)								0 unit		0 unit	-	2 unit	66.000.000	147.709.899									#DIV/0!						
		Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana								21 laporan	1.541.731.250	22 laporan	1.541.730.440	24 laporan	1.695.903.484	1.297.645.338									84,17						

[illegible]

		Kegiatan Pendayag unaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLK B)	Jumlah Jenis Sarana penunjang Tenaga PKB/PLKB									2 4	keca mat n		2 4	keca mat an		2 4	keca mat an																#D IV /0 !								
		Penggerak an Kader Institusi Masyarak at Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)									2 7 5 3	oran g	2.194. 418.55 0	2 7 5 3	oran g	1.818. 000.0 00	2 7 5 3	oran g	1.999. 800.00 0					2.45 6.34 5.00 0											11 1, 94							
		Kegiatan Pengendal ian dan Pendistrib usian Kebutuha n Alat dan Obat Kontrasep si Serta Pelaksana an Pelayanan KB Di Daerah Kabupate n/ Kota	Jumlah Kecamatan Penerima Alat dan Obat Kontrasepsi									2 4	keca mat n	2.119.8 94.750	2 4	keca mat an	3.231. 268.9 43	2 4	keca mat an	3.554. 395.83 7																0, 00							
		Pengendal ian Pendistrib usian Alat dan Obat Kontrasep si dan Sarana Penunjan g Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringny a	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									4 9	lapo ran	88.343 .500	4 9	lapo ran	1.205. 214.3 50	4 9	lapo ran	5.098. 770.27 2					46.1 30.0 00												52 ,2 2						
		Peningkat an kesertaan Pengguna an Metode Kontrasep si Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)									4 5 5	oran g	1.986. 551.69 0	5 5 0	oran g	1.976. 555.0 00	6 5 0	oran g	2.174. 210.50 0					1.35 2.41 0.00 0												68 ,0 8						
		Penyediaa n Sarana Penunjan g Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB									0	unit		0	unit	-				-				870. 260. 549												#D IV /0 !						

		Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan									33	laporan	14.999.760	33	laporan	16.499.800	33	laporan	1.550.000.000																0,00							
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak									12	laporan	29.999.800	12	laporan	32.999.793	12	laporan	36.299.772																	0,00						
		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pelaksana Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									24	kecamatan	1.216.600.000	24	kecamatan	1.216.600.000	24	kecamatan	1.338.260.000																	0,00						
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB									39	kampung	1.216.600.000	39	kampung	1.216.600.000	39	kampung	1.338.260.000				970.780.000													79,79						
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dimensi Ketentraman																																		#DIV/0!						
			Dimensi Kemandirian																																			#DIV/0!					

			Dimensi Kebahagiaa n																	5 5, 7 8											#D IV /0 !								
		Pelaksana an Pembangu nan Keluarga Melalui Pembinaa n Ketahana n dan Kesejahter aan Keluarga	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga yang dibutuhkan								2 4	unit			817.40 4.950		2 4	unit			605.0 00.00 0	2 4	keca mat an	9.523. 800.00 0										0, 00					
		Pengadaa n Sarana Kelompok Kegiatan Ketahana n dan Kesejahter aan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberda yaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UP PKS)											-			2 0	unit			282.80 0.000											#D IV /0 !							
		Penyediaa n Biaya Operasion al bagi Kelompok Kegiatan Ketahana n dan Kesejahter aan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberda yaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UP PKS)											-			1 0	kelo mpo k			650.00 0.000											#D IV /0 !							
		Penyediaa n Biaya Operasion al bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahana n dan Kesejahter aan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberda yaan Ekonomi	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UP PKS)															2 7 5 3	oran g			7.925. 500.00 0										#D IV /0 !							

[illegible]

2.4. Konsumen Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dinas yang mengampu urusan wajib bukan pelayanan dasar yakni urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Konsumen pelayanannya adalah masyarakat dan juga lintas sektor. Berikut ini penjelasan tentang mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

a. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian pelayanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki beberapa mitra dalam melaksanakan pelayanan. Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, Dinas bekerja sama dengan APH (Aparat Penegak Hukum) Seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, kemudian LPA (Lembaga Perlindungan Anak), APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia), Dunia Usaha dan Media, kemudian Forum Anak Kabupaten Pasuruan, PUSPA (Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) DMI (Dewan Masjid Indonesia), Tenaga Ahli Hukum, Tenaga Kesehatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat beserta Lintas Sektor seperti Sekolah-Sekolah, Perguruan Tinggi (Akademisi), Organisasi Masyarakat dan Perangkat Daerah. Mitra-Mitra tersebut kita perlukan untuk pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan perempuan dan anak, serta pembangunan yang responsif gender.

Untuk pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas bekerja sama dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD, Kelompok Kegiatan seperti Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Generasi Berencana, Organisasi Masyarakat dan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Tim Penggerak Keluarga (TPK) Pencegahan Stunting, Fasilitas Kesehatan baik negeri maupun swasta, Koalisi Kependudukan serta Perangkat Daerah yang bekerja sama untuk pelayanan KB, Pengendalian penduduk dan pencegahan penurunan stunting.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan dengan Identifikasi Permasalahan sebagai berikut :

1. Angka *unmetneed* (PUS yang tidak ber KB) masih tinggi;
2. Angka kesertaan KB MKJP masih rendah khususnya IUD, MOW dan MOP;
3. Masih rendahnya kesertaan KB Pria;
4. Belum optimalnya cakupan pelayanan KB Pasca Persalinan;
5. Belum optimalnya beberapa kampung KB yang sudah terbentuk;
6. Tantangan baru dalam pembangunan keluarga bagi sebagian masyarakat (Generasi milenial dan generasi Z);
7. Masih banyak keluarga yang berisiko stunting;
8. Masih tingginya pernikahan dini serta rendahnya pemahaman remaja terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
9. Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia;
10. Pemahaman dan pengetahuan Masyarakat khususnya masyarakat pedesaan tentang isu kesetaraan gender yang kurang dan juga kurangnya peran dan komitmen pemerintah kabupaten dan pemerintah desa melaksanakan penyusunan dokumen PPRG;
11. Kecenderungan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi;
12. Akses pelaporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih belum optimal;
13. Pemenuhan hak anak dan optimalisasi forum anak ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa masih kurang;

3.2. Isu – Isu Strategis

Tabel 3.1
Tabel Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

No.	Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis
1	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Hak Perempuan dan Hak Anak. Pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum berjalan dengan optimal karena data yang didapat terkadang kurang, sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan perempuan dan anak sudah dilaksanakan dengan gencar namun masih kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan budaya	Adanya UU baru di tahun 2022 yakni UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga terbitnya SE Kemendagri Nomor 463/5318/SJ tentang pembentukan UPTD PPA kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA. Tahun 2022 sudah mulai membentuk UPTD PPA di Kabupaten Pasuruan	Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2	Terkendalanya pelaporan dari TPK (Tim Pendamping Keluarga) ke TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) terkait keluarga resiko stunting	Keterlambatan Petunjuk Operasional (Jukops) dari pusat dalam penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban	Masih tingginya angka prevalensi stunting
3	Masih rendahnya peran aktif dari masyarakat di dalam kampung kb dan kampung kb yg terbentuk masih kurang komitmen untuk updating kampung KB khususnya RDK (Rumah DataKu)	Belum terintegrasinya data pengendalian penduduk dalam new SIGA (Sistem Informasi Keluarga)	Masih rendahnya capaian Kampung Keluarga Berkualitas
4	Masih Minimnya Desa Dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan Yang Menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung Kb)(Dari 321 Desa Dan 24 Kelurahan, Masih Terbentuk 39 Kampung Kb, 22 Tk.Dasar, 12 Berkembang, 3 Mandiri, 2 Berkelanjutan)	Mengingat Inpres.3 Th.2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Berkualitas, Dimana Target Tahun 2024 Semua Desa/ Kelurahan Di Indonesia	
5	Unmetneed masih tinggi disebabkan oleh bebrapa faktor seperti akarakteristik demografi,sosial budaya,sikap dan kualitas pelayanan, tetapi di Kabupaten Pasuruan salah satu utama kebanyakan orang yang tidak ingin ber-KB karena masalah kesehatan,takut efek samping dan sosial budaya		Masih tingginya UnmetNeed
No.	Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis

6	Masih rendahnya capaian MKJP yakni IUD,MOW dan MOP , dikarenakan takut dengan efek samping serta tidak mau menunda memiliki anak lebih lama		Masih rendahnya capaian MKJP
---	---	--	------------------------------

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Merujuk pada **Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026** yaitu **Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat**. Serta merujuk **Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026** yaitu **Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia** dengan indikator **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**, maka tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan ditentukan sebagai berikut :

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Pasuruan periode Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **Meningkatnya Pembangunan Keluarga**, mempunyai Indikator Tujuan yaitu **Indeks Pembangunan Keluarga (IPK/IBangga)**

2. Sasaran

Untuk mencapai Tujuan perlu adanya Sasaran, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Sasaran dan Indikator Sasaran sebagai berikut :

- a. Sasaran ke-1 yaitu **Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak**, mempunyai Indikator Sasaran sebagai berikut :
 - 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - 2) Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak
- b. Sasaran ke-2 yaitu **Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas**, mempunyai Indikator Sasaran sebagai berikut :
 - 1) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/
Unmet Need
 - 2) Persentase Kampung Keluarga Berkualitas

- c. Sasaran ke-3 yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**, mempunyai Indikator Sasaran sebagai berikut :

1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Adapun keselarasan Sasaran dari RPD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	SASARAN RPD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
1	2	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia (Indikator : Indeks Pembangunan Gender (IPG))	Meningkatnya Pembangunan Keluarga (Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga)	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,50	66,75	67,00
				Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	100%	100%	100%
			Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Berkualitas	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ Unmet Need	11,10%	11,00%	10,90%
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas	11,23%	11,50%	11,78%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,25%	83,75%	84,25%

4.2. Cascading Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk cascading Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan ada pada lampiran tabel 4.1. (EXCEL)

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*Outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 5.1 :
Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Periode Tahun 2024 s/d 2026

Sasaran RPD : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pembangunan Keluarga	1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak anak; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga / organisasi sosial masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak; 3. Meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada Bupati dan lintas OPD dalam penganggaran yang responsif gender; 4. Mengoptimalkan tim pendamping kekerasan tingkat desa / kelurahan, kecamatan , Forum Anak dan UPT PPA untuk pencegahan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta rehabilitasi korban; 5. Meningkatkan peran serta masyarakat, OPD terkait, dan segenap stake holder dalam mewujudkan Pasuruan Layak Anak dan Pasuruan yang responsive gender.	1. Optimalisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2. Peningkatan komitmen dan koordinasi dalam penganggaran yang responsive gender; 3. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan gender. 4. Optimalisasi tim pendamping kekerasan tingkat desa/kelurahan dan forum anak ; 5. Dukungan sarana prasarana bagi komunitas forum anak ; 6. Penguatan korban kekerasan secara fisik, psikologis dan ekonomi 7. Peningkatan komitmen dan koordinasi antar PD terkait maupun aparat penegak hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak

Sasaran RPD : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas	1. Pencegahan stunting dengan melakukan KIE mengenai kesehatan reproduksi dan gizi serta pola asuh anak kepada masyarakat 2. Meningkatkan dan melakukan revitalisasi Program KB khususnya MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang); 3. Pembinaan peserta KB dan peningkatan advokasi – KIE ; 4. Masyarakat dan meningkatkan peran serta mitra kerja dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk ber KB; 5. Meningkatkan pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan menurunkan angka Drop Out (DO), serta meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP); 6. Mengoptimalkan distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal agar kebutuhan ber KB terpenuhi secara baik. 7. Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan/PKK untuk dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 8. Meningkatkan pemahaman mengenai 8 fungsi keluarga dalam ketahanan keluarga 9. Meningkatkan pembinaan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA), PIK-R, GenRe dan PPKS dalam ketahanan dan pembangunan keluarga; 10. Meningkatkan pembinaan remaja melalui PIK-R /Generasi Berencana (Genre).	1. Percepatan penurunan keluarga resiko stunting 2. Peningkatan cakupan akseptor MKJP; 3. Pemerataan kelengkapan dukungan pelayanan dan penyuluhan KB 4. Pelayanan akseptor KB yang berkualitas; 5. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi akseptor KB melalui program Bangga Kencana 6. Peningkatan pembangunan dan ketahanan keluarga dan pembentukan karakter keluarga yang berkualitas; 7. Dukungan sarana prasarana bagi kelompok kegiatan (poktan) tribina (BKB, BKR,BKL) dan PIK-R, GenRe dan PPKS ; 8. Optimalisasi Poktan Tribina (BKB,BKR,BKL),UPPKA, PIK-R dan GenRe 9. Peningkatan kader IMP dalam penyuluhan berwawasan kependudukan 10. Peningkatan dukungan antar lintas sektor dan masyarakat dalam pembangunan berwawasan kependudukan 11. Optimalisasi Kampung KB 12. Optimalisasi updating data kependudukan

Sasaran RPD : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
		13.Meningkatkan peran penggerakan kader IMP dalam KIE wawasan kependudukan 14.Meningkatkan peran serta dan komitmen lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan 15.Mengoptimalkan dan mengembangkan kampung KB 16.Mengoptimalkan keberadaan Kampung KB dalam peningkatan kesejahteraan keluarga; 17.Mengoptimalkan <i>updating</i> data kependudukan dan keluarga beresiko stunting melalui aplikasi SIGA dan Pendataan Keluarga	
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan manajemen kinerja aparatur pemerintah daerah 2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan :

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif melalui rumusan yang terkait dengan RPJMD program prioritas yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi dan kemendesakan. Dalam konteks ini kebutuhan pendanaan lebih dititikberatkan pada pengalokasian persentase anggaran belanja untuk program-program prioritas yang merupakan bagian dari belanja langsung dan tidak langsung non gaji. Dengan demikian, besarnya persentase anggaran untuk masing-masing program prioritas diperoleh dari total anggaran belanja daerah setelah dikurangi belanja tidak langsung dari komponen belanja pegawai. Proyeksi persentase alokasi anggaran untuk masing-masing program prioritas dapat dilihat pada tabel Rencana Program, dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Untuk Program dan Kegiatan harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program dan Kegiatan harus sesuai dengan peraturan diatas, serta ada penambahan sub kegiatan, jadi terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Berikut ini Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 – 2026 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1 Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 9 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 10 Pengadaan Mebel
 - 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5 Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 14 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 16 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 17 Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- 7 Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 18 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - 19 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 20 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk

PPRG

- 21 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- 8 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 22 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

3. Program Perlindungan Perempuan

- 9 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 23 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 10 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 24 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 25 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- 11 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 26 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 12 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 27 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Perlindungan Khusus Anak

- 13 Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 28 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 29 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- 14 Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- 30 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 15 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 31 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

6. Program Pengendalian Penduduk

- 16 Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- 32 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
- 33 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal
- 17 Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- 34 Perumusan Parameter Kependudukan
- 35 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
- 36 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
- 37 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
- 38 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
- 39 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- 18 Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- 40 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan budaya lokal
- 41 Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK

- 42 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- 43 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
- 44 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
- 45 Pengendalian Program KKBPK
- 19 Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - 46 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
 - 47 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- 20 Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
 - 48 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 49 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 50 Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - 51 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
 - 52 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 53 Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
 - 54 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
 - 55 Peningkatan Kesertaan KB Pria
- 21 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - 56 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - 57 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
- 8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**
 - 22 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- 58 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 59 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 60 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 61 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)
- 62 Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK
- 63 Sosialisasi IPK
- 23 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 64 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

6.2. Pendanaan Indikatif

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran sebagaimana tersebut diatas pada pendanaan indikatif secara rinci sebagaimana terlampir pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Kode		Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi														
																Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD																		
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)				
-												-		Total Belanja						23.144.977.490				27.438.288.045				29.836.116.850				32.870.228.534				57.274.404.895						
1.	Meningkatnya Pembiayaan Keluarga	1.	Indeks Pembiayaan Keluarga (IPK)	1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Program :		Outcome :																															
								X.XX.01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi		100%	100%	5.858.293.436	100%	6.840.187.366	100%	7.210.206.102	100%	8.013.726.712	100%	22.064.120.180																			KABUPATEN PASURUAN
									Kegiatan :		Output :																															
								X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi		100%	100%	115.000.000	100%	50.000.000	100%	122.000.000	100%	134.200.000	100%	306.200.000																			
								X.XX.01.2.01.01	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	110.000.000	9 Dokumen	240.000.000																			
								X.XX.01.2.01.02	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	22.000.000	2 Laporan	24.200.000	6 Laporan	66.200.000																			SEKERTARIAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan		100%	100%	4.703.806.696	100%	5.259.187.366	100%	5.785.106.102	100%	6.446.116.712	100%	17.490.410.180																			
								X.XX.01.2.02.01	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	23 Orang/Bulan	3.399.046.696	23 Orang/Bulan	3.738.951.366	23 Orang/Bulan	4.112.846.502	22 Orang/Bulan	4.524.131.152	68 Orang/Bulan	12.375.929.020																			
								X.XX.01.2.02.02	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1.304.760.000	12 Dokumen	1.435.236.000	12 Dokumen	1.653.759.600	12 Dokumen	1.819.135.560	36 Dokumen	4.908.131.160																			
								X.XX.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen		12 Dokumen	85.000.000	12 Dokumen	93.500.000	12 Dokumen	102.850.000	36 Dokumen	281.350.000																			
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen kepegawaian		0%	0%		100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000																											

T u j u a n	Indikator Tujuan	S a s a r a n	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
						yang akurat dan sesuai ketentuan													
					X.XX.01.2.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang		2 Orang	10.000.000	2 Orang	11.000.000	2 Orang	12.100.000	6 Orang	33.100.000	
					X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	10 %0	10 %0	160.037.180	10 %0	181.000.000	10 %0	199.100.000	10 %0	219.010.000	10 %0	599.110.000	
					X.XX.01.2.06.01	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 paket	65 paket	49.998.480	65 paket	55.000.000	65 paket	60.500.000	62 paket	66.550.000	192 paket	182.050.000	
					X.XX.01.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket	17 paket	25.038.700	17 paket	26.000.000	17 paket	28.600.000	17 paket	31.460.000	51 paket	86.060.000	
					X.XX.01.2.06.09	- Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	44 Laporan	44 Laporan	85.000.000	44 Laporan	100.000.000	45 Laporan	110.000.000	50 Laporan	121.000.000	139 Laporan	331.000.000	
					X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	10 %0	10 %0	69.645.000	10 %0	430.000.000	10 %0	92.000.000	10 %0	101.200.000	10 %0	623.200.000	
					X.XX.01.2.07.02	- Pengadaan Mebel	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	2 unit	4.977.000	2 unit	10.000.000	2 unit	15.000.000	2 unit	16.500.000	6 unit	41.500.000	
					X.XX.01.2.07.05	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	14.892.000	1 unit	20.000.000	1 unit	22.000.000	1 unit	24.200.000	3 unit	66.200.000	
					X.XX.01.2.07.10	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	49.776.000	2 unit	50.000.000	2 unit	55.000.000	2 unit	60.500.000	6 unit	165.500.000	
					X.XX.01.2.07.11	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0 unit		1 unit	350.000.000	0 unit		0 unit		1 unit	350.000.000	
					X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia	10 %0	10 %0	609.806.860	10 %0	670.000.000	10 %0	737.000.000	10 %0	810.700.000	10 %0	2.217.700.000	

T u j u a n	Indikator Tujuan	S a s a r a n	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
									Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD										
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)								
				2.08.02.2.01.01	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustama an Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Ko ta	6	Doku men	6	Doku men	10.000.000	6	Doku men	20.000.000	6	Doku men	22.000.000	6	Doku men	24.200.000	18	Doku men	66.200.000	KELUARGA BERENCANA	
				2.08.02.2.01.02	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ K ota	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustama an Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Ko ta	6	Doku men	6	Doku men	10.000.000	6	Doku men	40.000.000	6	Doku men	44.000.000	6	Doku men	48.400.000	18	Doku men	132.400.000		
				2.08.02.2.01.03	-	Advokasi Kebijakan dan Pendampinga n Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	-	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustama an Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Ko ta	55	Perang kat Daera h	55	Perang kat Daera h	10.000.000	55	Perang kat Daera h	40.000.000	55	Perang kat Daera h	44.000.000	55	Perang kat Daera h	48.400.000	55	Perang kat Daera h	132.400.000		
				2.08.02.2.01.04	-	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	-	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustama an Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Ko ta		Perang kat Daera h	55	Perang kat Daera h	120.000.000	55	Perang kat Daera h	200.000.000	55	Perang kat Daera h	220.000.000	55	Perang kat Daera h	242.000.000	55	Perang kat Daera h	662.000.000		

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
									Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD						
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
						2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase organisasi masyarakat perempuan yang mendapat pelatihan	10 % 0	10 % 0	170.000.000	10 % 0	200.000.000	10 % 0	220.000.000	10 % 0	242.000.000	10 % 0	662.000.000	BIDANG PUG, PP-PA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
						2.08.02.2.02.01	-	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum, Sosial dan Ekonomi	-	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	7 Doku men	7 Doku men	170.000.000	7 Doku men	200.000.000	8 Doku men	220.000.000	9 Doku men	242.000.000			24 Doku men	662.000.000
					1.1.2		Program :		Outcome :								-		-				-
						2.08.03	Perlindungan Perempuan		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)		9, % 80	9, % 80	135.000.000	9, % 76	160.000.000	9, % 50	176.000.000	9, % 20	193.600.000			9, % 20	529.600.000
							Kegiatan :		Output :								-		-				-
						2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Kecamatan yang melaksanakan layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan		10 % 0	10 % 0	55.000.000	10 % 0	60.000.000	10 % 0	66.000.000	10 % 0	72.600.000			10 % 0	198.600.000
						2.08.03.2.01.01	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Doku men	2 Doku men	55.000.000	2 Doku men	60.000.000	2 Doku men	66.000.000	2 Doku men	72.600.000			6 Doku men	198.600.000
						2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang terstandarisasi		20 layana n	20 layana n	80.000.000	30 layana n	100.000.000	40 layana n	110.000.000	50 Layan an	121.000.000			120 layana n	331.000.000

T u j u a n	Indikator Tujuan	S a s a r a n	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
									Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD						
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
					2.08.03.2.02.01	-	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	-	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 orang	20 orang	10.000.000	30 orang	20.000.000	40 orang	22.000.000	50 orang	24.200.000	120 orang	66.200.000			
					2.08.03.2.02.02	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	-	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	20 layanan	20 layanan	70.000.000	30 layanan	80.000.000	40 layanan	88.000.000	50 layanan	96.800.000	120 layanan	264.800.000			
						Program :		Outcome :								-		-		-			
					2.08.06	Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Persentase terpenuhinya hak anak di kabupaten		100 %	100 %	285.920.100	100 %	420.000.000	100 %	462.000.000	100 %	508.200.000	100 %	1.390.200.000			
						Kegiatan :		Output :							-		-		-				
					2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota		Persentase anggota gugus tugas peserta rakor kelembagaan PHA		100 %	100 %	9.999.800	100 %	120.000.000	100 %	132.000.000	100 %	145.200.000	100 %	397.200.000			
					2.08.06.2.01.02	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Dokumen	30 Dokumen	9.999.800	30 Dokumen	120.000.000	35 Dokumen	132.000.000	40 Dokumen	145.200.000	105 Dokumen	397.200.000			
					2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota		Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		100 %	100 %	275.920.300	100 %	300.000.000	100 %	330.000.000	100 %	363.000.000	100 %	993.000.000			

T u j u a n	Indikator Tujuan	S a s a r a n	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi										
										Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD													
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)										
							2.08.06.2.02.02	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24	Dokumen	24	Dokumen	275.920.300	24	Dokumen	300.000.000	24	Dokumen	330.000.000	24	Dokumen	363.000.000	72	Dokumen	993.000.000			
							Program :		Outcome :																						
							2.08.07	Perlindungan Khusus Anak		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		100	%	100	%	129.999.600	100	%	175.000.000	100	%	192.500.000	100	%	211.750.000	100	%	579.250.000			
								Kegiatan :		Output :																					
							2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase kecamatan yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak			100	%	100	%	1.000.000	100	%	20.000.000	100	%	22.000.000	100	%	24.200.000	100	%			66.200.000
							2.08.07.2.01.02	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1	Dokumen	1.000.000	2	Dokumen	20.000.000	2	Dokumen	22.000.000	2	Dokumen	24.200.000	6	Dokumen	66.200.000				
							2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		jumlah layanan rujukan bagi anak korban kekerasan yang terstandarisasi		70	layanan	70	layanan	127.999.800	80	layanan	150.000.000	85	layanan	165.000.000	90	layanan	181.500.000	255	layanan	496.500.000			
							2.08.07.2.02.01	-	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususTingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	70	orang	70	orang	109.999.900	80	orang	120.000.000	85	orang	132.000.000	90	Orang	145.200.000	255	orang	397.200.000			

T u j u a n	Indikator Tujuan	S a s a r a n	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi																						
									Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD																										
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.																									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)																							
																					-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	70	layana n	70	layana n	17.999.900	80	layana n	30.000.000	85	layana n	33.000.000	90	Layana n	36.300.000	255	layana n	99.300.000		
																					Kegiatan :																						
																					2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelaksanaan pengembanga n lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindunga khusus	1	layana n	1	layana n	999.800	1	layana n	5.000.000	1	layana n	5.500.000	1	layana n	6.050.000	3	layana n	16.550.000		
																					2.08.07.2.03.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	Doku men	1	Doku men	999.800	1	Doku men	5.000.000	1	Doku men	5.500.000	1	Doku men	6.050.000	3	Doku men	16.550.000	
																					Program :		Outcome :																				
																					2.14.02	Pengendalian Penduduk	Persentase Kecamatan yang melakukan updating SIGA		100	%	100	%	686.000.000	100	%	795.500.000	100	%	875.050.000	100	%	962.555.000	100	%	2.633.105.000	BIDANG PENGENDALI AN PENDUDUK,P ENYULUHAN DAN PENGGERAKA N DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK SERTA PENGENDALI AN	KABU PATEN PASU RUAN
																						Kegi atan :	Output :																				
																					2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi KebijakanPemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah Dokumen GDPK Kabupaten Pasuruan	1	Dokum en	1	Dokum en	161.000.000	1	Dokum en	170.000.000	1	Dokum en	187.000.000	1	Dokum en	205.700.000	1	Dokum en	562.700.000		

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Kode		Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi									
																Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD															
																Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.														
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)	
								2.14.02.2.01.13	-	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	-	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	5	organi sasi	5	organi sasi	161.000.000	5	organi sasi	70.000.000	5	organi sasi	77.000.000	5	organi sasi	84.700.000	15	organi sasi	231.700.000	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
								2.14.02.2.01.12	-	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal		satuan pendid ikan		5	satuan pendid ikan	100.000.000	5	satuan pendid ikan	110.000.000	6	satuan pendid ikan	121.000.000	16	satuan pendid ikan	331.000.000												
								2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Kecamatan yang melakukan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk		10 0	%	10 0	%	525.000.000	10 0	%	625.500.000	10 0	%	688.050.000	10 0	%	756.855.000	10 0	%	2.070.405.000										
								2.14.02.2.02.01	-	Perumusan Parameter Kependudukan	-	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1	Lapora n	1	Lapora n	20.000.000	1	Lapora n	30.000.000	1	Lapora n	33.000.000	1	lapora n	36.300.000	3	Lapora n	99.300.000										
								2.14.02.2.02.12	-	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	24	Lapora n	24	Lapora n	314.800.000	24	Lapora n	346.280.000	24	Lapora n	380.908.000	24	Lapora n	418.998.800	72	Lapora n	1.146.186.800										
								2.14.02.2.02.13	-	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	24	Lapora n	24	Lapora n	126.000.000	24	Lapora n	138.600.000	24	Lapora n	152.460.000	24	Lapora n	167.706.000	72	Lapora n	458.766.000										

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
						Program KKBPK															
					2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Persentase penunjang Tenaga PKB/ PLKB	10 % 0	10 % 0	1.258.00 0.000	10 % 0	1.958.00 0.000	10 % 0	2.153.80 0.000	10 % 0	2.369.18 0.000	10 % 0	6.480.98 0.000	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK,P ENYULUHAN DAN PENGGERAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
					2.14.03.2.02.01	- Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	- Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	6 organi sasi	6 organi sasi	128.000. 000	6 organi sasi	128.000. 000	6 organi sasi	150.000. 000	6 organi sasi	165.000. 000	6 organi sasi	443.000. 000			
					2.14.03.2.02.04	- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	- Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	27 orang 53	27 orang 53	1.130.00 0.000	27 orang 53	1.830.00 0.000	27 orang 53	2.003.80 0.000	27 orang 53	2.204.18 0.000	27 orang 53	6.037.98 0.000			
					2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase KecamatanPenerima Alat dan Obat Kontrasepsi	10 % 0	10 % 0	3.904.41 4.324	10 % 0	4.639.12 5.756	10 % 0	5.071.03 8.332	10 % 0	5.546.14 2.165	10 % 0	15.256.3 06.254			
					2.14.03.2.03.01	- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	- Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	49 lapora n	49 lapora n	52.199.8 00	58 lapora n	57.419.7 80	58 lapora n	63.161.7 58	58 lapora n	69.477.9 34	58 lapora n	190.059. 472	BIDANG KB DAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
					2.14.03.2.03.02	- Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				25 orang 0	100.000. 000	25 orang 0	100.000. 000	25 orang 0	100.000. 000	75 orang 0	300.000. 000			

T u j u a n		Indikator Tujuan	S a s a r a n	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	
									Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)							
						2.14.03.2.03.03	-	Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	65 orang 0	65 orang 0	2.302.177.900	75 orang 0	2.532.395.690	80 orang 0	2.785.635.259	85 orang 0	3.064.198.785	24 orang 00	8.382.229.734					
						2.14.03.2.03.04	-	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	-	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				20 Laporan	20.000.000	20 Laporan	20.000.000	20 Laporan	20.000.000	60 Laporan	60.000.000					
						2.14.03.2.03.06	-	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	3 unit	3 unit	1.503.136.624	3 unit	1.653.450.286	3 unit	1.818.795.315	4 unit	2.000.674.847	10 unit	5.472.920.448					
						2.14.03.2.03.07	-	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				45 orang 0	150.000.000	45 orang 0	150.000.000	45 orang 0	150.000.000	13 orang 50	450.000.000					
						2.14.03.2.03.08	-	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33 laporan	33 laporan	32.600.000	33 laporan	35.860.000	33 laporan	39.446.000	33 laporan	43.390.600	99 laporan	118.696.600					
						2.14.03.2.03.11	-	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	-	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12 laporan	12 laporan	14.300.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	44.000.000	12 laporan	48.400.000	36 laporan	132.400.000					
						2.14.03.2.03.13	-	Peningkatan Kesertaan KB Pria	-	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				15 orang 0	50.000.000	15 orang 0	50.000.000	15 orang 0	50.000.000	45 orang 0	150.000.000					
						1.2.3	Persentase Kampung Keluar ga Berku alitas	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase kecamatan yang melaksanakan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	10 % 0	10 % 0	613.500.000	10 % 0	800.000.000	10 % 0	880.000.000	10 % 0	968.000.000	10 % 0	2.648.000.000	BIDANG PENGENDALI AN PENDUDUK,P ENYULUHAN DAN PENGGERAKA N DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK SERTA				
									2.14.03.2.04.02	-	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor	1 dokum en	1 dokum en	12.300.000	2 dokum en	150.000.000	2 dokum en	180.000.000	2 dokum en	198.000.000	6 dokum en	528.000.000		

T u j u a n		Indikator Tujuan	S a s a r a n	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
									Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD						
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
							di Kampung KB											PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
						2.14.03.2.04.03	-	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPk di Kampung KB	-	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	39 kampung	39 kampung	601.200.000	39 kampung	650.000.000	40 kampung	700.000.000	41 kampung	770.000.000	41 kampung	2.120.000.000		
							Program :		Outcome :							-		-		-			
						2.14.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Persentase Kelompok Kegiatan Pembinaan Keluarga aktif melaporkan		57,85 %	57,85 %	8.623.100.100	58,00 %	9.678.410.000	58,15 %	10.646.251.000	58,30 %	11.710.876.100	58,30 %	32.035.537.100		KABUPATEN PASURUAN
							Kegiatan :	Output :							-		-		-		-		
						2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Kecamatan Pelaksana Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga		100 %	100 %	8.603.100.200	100 %	9.638.410.000	100 %	10.602.251.000	100 %	11.662.476.100	100 %	31.903.137.100		
						2.14.04.2.01.02	-	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	-	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	20 unit	20 unit	360.000.000	20 unit	396.000.000	20 unit	435.600.000	20 unit	479.160.000	60 unit	1.310.760.000	BIDANG KB DAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA	
						2.14.04.2.01.06	-	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	-	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	0 kelompok	0 kelompok		2 kelompok	20.000.000	2 kelompok	22.000.000	2 kelompok	24.200.000	6 kelompok	66.200.000	PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

T u j u a n	Indikator Tujuan	S a s a r a n	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD			
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	

T u j u a n		Indikator Tujuan	S a s a r a n		Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
											Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD				
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
						Kesejahteraan Keluarga																	
						2.14.04.2.02.04	-	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	-	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	12 laporan	12 laporan	19.999.900	12 laporan	40.000.000	12 laporan	44.000.000	12 laporan	48.400.000	36 laporan	132.400.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Penetapan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan Sasaran Kabupaten Pasuruan untuk periode 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2024-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun (%)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (%) (2026)
		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
Tujuan PD						
A.	Indeks Pembangunan Keluarga	55,30	55,40	55,50	55,60	55,60
Sasaran PD						
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,25	66,50	66,75	67,00	67,00
2	Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ Unmet Need	11,16%	11,10%	11,00%	10,90%	10,90%
4	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas	10,95%	11,23%	11,50%	11,78%	11.78%
5	Nilai SAKIP	82,75	83,25	83,75	84,25	84,25

7.2. Penentuan Target Pertumbuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengampu 2 urusan pemerintah daerah wajib non pelayanan dasar yakni urusan Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Mengacu pada Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Kunci, berikut ini IKK Outcome yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 7.1
Target Indikator Kinerja Kunci Dinas P3AP2KB 2024-2026

No	Urusan /Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)
		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	9
A.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	23,05%	23,10%	23,15%	23,20%	23,20%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	9,80	9,76	9,50	9,20	9,20
B.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,02	2,00	1,98	1,96	1,96
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	73,23%	73,50%	73,70%	74,00%	74,00%
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	11,16%	11,10%	11,00%	10,90%	10,90%

BAB VIII

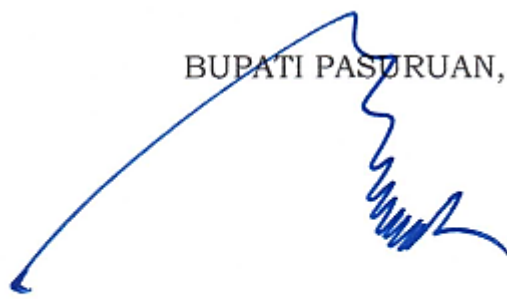
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman sebagai implementasi penjabaran tugas dan fungsi oleh segenap pegawai Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan dalam rangka mengaktualisasikan tupoksi.

Pada dasarnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024-2026 ini akan berhasil dengan baik dalam pelaksanaannya apabila dilakukan koordinasi, sinkronisasi, komunikasi yang baik dan optimal dari semua pihak yang terkait baik secara vertikal maupun horizontal serta mau dan mampu berjalan dengan selaras, serasi dan seimbang serta adanya saling pengertian dan menjadikan acuan dalam melaksanakan tugas bagi aparat Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024-2026 yang akan dijadikan penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF